



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : NURUL QOMARIYAH
- Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
- NHK : 113191

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.911.000.000

- Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 231.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.000.000

- MOBIL, SUZUKI STATION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 52.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 439.259.931

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.502.759.931

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.502.759.931

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.